

ADMINISTRASI KURIKULUM DALAM PERSPEKTIF MERDEKA BELAJAR DI MI MASHOLIHUL HUDA KRAPYAK

Riza A'yunil A'la¹, Dwiva Zumarul Muna², Akhirin³
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara Indonesia ^{1,2,3}
rizaayunilala@gmail.com¹

Abstract: *The purpose of this study is to evaluate curriculum administration in the context of Merdeka Belajar at MI Masholihul Huda Krapyak. This research is motivated by the importance of understanding how curriculum administration can support the implementation of Merdeka Belajar concept. The problem raised in this research is about how curriculum administration can adapt to the principles of Merdeka Belajar and how the curriculum administration process can provide opportunities for individual learning. The theories used in this study are based on literature related to curriculum administration theory, independent curriculum theory, and Merdeka Belajar theory. Researchers use descriptive qualitative methods by using data collection techniques through interviews, observation and document analysis. The findings show that curriculum administration based on Merdeka Belajar requires a paradigm shift in terms of design and implementation. Based on this understanding, this research produces innovative recommendations for curriculum system modifications aimed at increasing the effectiveness of Merdeka Belajar.*

Keywords: *Curriculum Administration, independent curriculum, Merdeka Belajar*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi administrasi kurikulum dalam konteks Merdeka Belajar di MI Masholihul Huda Krapyak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami bagaimana administrasi kurikulum dapat mendukung implementasi konsep Merdeka Belajar. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana administrasi kurikulum dapat beradaptasi dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar dan bagaimana proses administrasi kurikulum dapat memberikan kesempatan untuk belajar secara individu. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada literatur yang berkaitan dengan teori administrasi Kurikulum, teori kurikulum merdeka, dan teori Merdeka Belajar. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen. Hasil penemuan menunjukkan bahwa administrasi kurikulum berdasarkan Merdeka Belajar membutuhkan perubahan paradigma dalam hal desain dan implementasi. Berdasarkan pemahaman ini, penelitian ini menghasilkan rekomendasi inovatif untuk modifikasi sistem kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas Merdeka Belajar.

Kata kunci: *Administrasi Kurikulum, kurikulum merdeka, Merdeka Belajar*

Pendahuluan

Berkembang pesatnya zaman serta perubahan dalam paradigma pendidikan, menuntut dunia pendidikan untuk menekankan pada kemandirian dan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Maka, diperlukan adaptasi kurikulum untuk mempersiapkan siswa menghadapi cepatnya pembaharuan yang sedang terjadi. Menanggapi hal tersebut, KEMENDIKBUD (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) menawarkan sebuah gagasan untuk menyongsong pendidikan yang lebih baik bagi peserta didik melalui Kurikulum Merdeka Belajar (Siregar et al., 2020). Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beraneka ragam dan konten yang lebih maksimal agar peserta didik mempunyai banyak waktu untuk memahami konsep serta mengukuhkan kompetensinya (Khoirurrujal et al., 2022). Dalam definisi lain menyatakan bahwa Kurikulum Merdeka merupakan upaya dalam pembentukan perubahan pendidikan Indonesia agar tercipta generasi masa depan yang lebih tangguh. Hal itu sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh Saleh (2020) yang menyatakan bahwasanya Merdeka Belajar adalah salah satu program yang dirancang untuk menggali keterampilan bagi para guru dan peserta didik dalam upaya membuat trobosan untuk memaksimalkan kualitas pembelajaran di kelas (Angga et al., 2022).

Kurikulum Merdeka ada untuk melengkapi implementasi kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Seperti yang telah dijabarkan dalam penelitian oleh (Wahyuni & Berliani, 2019)

bahwasannya guru menjumpai kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum 2013, seperti dalam hal RPP, penerapan pembelajaran saintifik, dan evaluasi pembelajaran. Oleh sebab itu, maka pemerintah membentuk inovasi baru dengan adanya Kurikulum Merdeka.

Salah satu kebijakan yang ada dalam kurikulum Merdeka adalah kebijakan merdeka belajar. Merdeka belajar dapat dipahami sebagai program untuk menelusuri dan mengembangkan potensi para pendidik sehingga peserta didik dalam berinovasi juga memajukan kualitas pembelajaran dikelas (Angga et al., 2022). Sebagai suatu kebijakan yang harus dilaksanakan dan dioperasionalkan oleh lembaga pendidikan, merdeka belajar dimaknai sebagai suatu kebebasan yang sesungguhnya dalam belajar, dimana sebelumnya masih banyak pengekan dalam kebebasan mengembangkan potensi yang dikuasai peserta didik (Mastuti et al., 2020). Merdeka belajar menjadi konsep yang sangat sesuai untuk dipakai di masa industri revolusi. Nadiem Makarim, selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa merdeka belajar merupakan kemerdekaan dalam hal berpikir maupun kemerdekaan yang ditetapkan oleh pendidik sebagai hal pokok untuk mendukung pendidikan yang lebih maju (Mustaghfiroh, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa Indonesia selalu berusaha untuk menjadikan kualitas pendidikannya selalu berkembang menjadi baik, salah satunya dengan melaksanakan perubahan atau pengembangan pada kurikulum. Hal tersebut juga yang melatarbelakangi

mengapa kurikulum di Indonesia sering berganti, seperti sekarang ini, kurikulum 2013 yang digantikan oleh kurikulum merdeka. Seperti yang telah dijabarkan dalam penelitian oleh (Andriani, 2020) dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kurikulum pada dasarnya harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Apabila tidak dapat beradaptasi Hal tersebut akan berakibat pada keterlambatan proses pembelajaran. Disamping itu, perubahan kurikulum juga merupakan salah satu cara dalam menangani problem-problem yang terjadi dalam dunia pendidikan.

Sebagai salah satu usaha dalam mengatasi problem-problem dalam dunia pendidikan, kurikulum harus diselenggarakan dengan baik. Pengelolaan kurikulum biasa disebut dengan administrasi kurikulum. Keberhasilan suatu pendidikan tidak hanya bergantung dari guru atau sarana prasarana yang tersedia, pengkoordinasian segala hal agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan bisa terlaksana dengan baik apabila administrasi kurikulum nya juga dikelola dengan baik (Efritania, n.d.). menurut penelitian yang telah dilakukan oleh (Efendi & Afriansyah, 2019) yang menyakaan bahwa kurikulum memiliki peran yang berpengaruh dalam dunia pendidikan, oleh sebab itu harus memiliki pengelolaan yang tepat, maka diperlukan administrasi kurikulum. Administrasi ini sangat dibutuhkan demi berjalannya proses belajar mengajar. Untuk itu dibutuhkan orang yang tepat untuk bekerja dibidang administrasi ini, untuk menunjang keberhasilan dalam Pendidikan

Administrasi kurikulum diartikan sebagai suatu kegiatan rutin yang dipikirkan, direncanakan, dan dilaksanakan secara cermat. Hal ini juga mengacu pada pengawasan berkelanjutan terhadap lingkungan belajar mengajar untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang ditetapkan tercapai (Satrio). Menurut penelitian yang telah di laksanakan oleh (Turnip et al., 2023) tentang administrasi kurikulum, menyatakan bahwa administrasi kurikulum secara langsung maupun tidak langsung mampu meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan penerapan kurikulum merdeka, penulis tertarik untuk membahas tentang administrasi kurikulum dalam perspektif merdeka belajar, yang akan kami lakukan studi kasus di MI Masholihul Huda Krapyak, dimana madrasah tersebut adalah salah satu lembaga pendidikan yang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Maka penulisan yang berjudul “Administrasi Kurikulum dalam Perspektif Merdeka Belajar di MI Masholihul Huda Krapyak” ini akan membahas bagaimana pelaksanaan administrasi kurikulum dengan perspektif merdeka belajar terlaksana di madrasah tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mendorong penggunaan penjelasan berbasis teks. Penelitian didasarkan pada paradigma naturalistik dan fenomenologis , dilakukan dalam lingkungan yang dapat dipahami hubungannya dengan fenomena tertentu. (Hermawan, 2019). Penelitian kualitatif

digunakan dalam meneliti suatu fenomena alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen utama.

Rancangan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yang tujuannya supaya peneliti bisa mengeksplorasi secara mendalam tentang Administrasi Kurikulum dalam Perspektif Merdeka Belajar di MI Masholihul Huda Krapyak. Teknik Pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti yaitu melalui beberapa tahapan, ada observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2014). Wawancara dilakukan dengan waka kurikulum Imronah Hanani, sebagai narasumber untuk mengumpulkan berbagai data terkait Administrasi Kurikulum dalam Perspesktif Merdeka Belajar di MI Masholihul Huda Krapyak. Kemudian peneliti melakukan observasi untuk memperhatikan proses pembelajaran yang berlangsung. Selanjutnya peneliti menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan beberapa dokumen dan foto terkait penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan triagulasi sumber data, Dimana teknik analisis data yang dilaksanakan terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Administrasi Kurikulum Perspektif Merdeka Belajar

Kata organisasi berasal dari kata latin "promosi" dan "ministro". " Ad berarti "untuk" dan ministro berarti "melayani". Hal ini cenderung diterima secara jelas bahwa organisasi adalah administrasi atau komitmen terhadap

subjek tertentu yang mempunyai arti penting dalam melayani. (Azis, 2016). Secara etimologis, administrasi adalah segala berbentuk kolaborasi antara setidaknya dua individu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Syafiie & Welasari, 2017).

Sedangkan menurut Herbert Simon administrasi adalah suatu aktivitas sekelompok kerjasama untuk memperoleh tujuan yang sama (Marliani, 2018). Menurut definisi lainnya administrasi memiliki arti suatu ilmu yang dipelajari oleh masyarakat yang berasal dari pemerintah, dan cara memperolehnya.

Dalam lingkungan pendidikan, pengorganisasian sangat penting untuk mengawasi berbagai perspektif, termasuk program pendidikan. Program pendidikan merupakan bagian fundamental dari sistem sekolah negeri yang telah ada sejak awal berdirinya. Dalam strategi sekolah umum. Rencana pendidikan hanya menekankan pada membaca, menulis, dan mendengarkan. Setiap kali ada perkembangan zaman, pendidikan, baik formal maupun informal, harus menyesuaikan kurikulumnya dengan waktu. Akibatnya, kurikulum nasional mengalami perkembangan zaman yang sangat signifikan.

Administrasi kurikulum adalah semua proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara bersungguh-sungguh terhadap situasi belajar demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditentukan (Kurnia, 2019). Administrasi kurikulum memiliki 5 prinsip penting guna merancang dan mengimplementasikan kurikulum yaitu:

Prinsip Relevansi, Efektifitas, Efisiensi, Continuitas, dan Prinsip Fleksibilitas. Dan dalam penerapan sistem administrasi kurikulum dapat melalui 3 tahap kegiatan yaitu: Persiapan, Pelaksanaan dan penutupan (Ariawan et al., 2023). Administrasi kurikulum dan merdeka belajar memiliki keterkaitan yang erat, membentuk sinergi dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik.

Merdeka belajar merupakan pandangan yang membebaskan pendidik dan peserta didik dalam menghadapi kerangka pembelajaran. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, Merdeka Belajar adalah suatu metodologi yang dilakukan dengan tujuan agar siswa dan siswa dapat memilih contoh yang mereka butuhkan. Merdeka belajar lebih menekankan aspek keterampilan daripada aspek pengetahuan dan lebih menekankan pada pengembangan karakter para peserta didik. Dengan tujuan mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan dan diharapkan merdeka belajar mampu memberikan transfigurasi ke arah yang lebih baik serta memberikan manfaat positif pada lingkungan.

Merdeka belajar lebih menitikberatkan pada kebebasan bagi pendidik dan peserta didik untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Guru juga diharapkan mampu menjadi inisiator untuk memutuskan berbagai tindakan yang dapat memberikan hal yang baik untuk peserta didik, dan guru diharapkan lebih mampu mendahulukan peserta didik di atas kepentingan dirinya sendiri.

Dan Dapat disimpulkan bahwa, merdeka belajar adalah kebebasan seseorang dalam memperjuangkan suatu

perubahan pada dirinya dan dilakukan secara sengaja dan sadar dengan tetap mengikuti peraturan pemerintah (Qori'ah, 2022).

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang lebih menitikberatkan pada pembelajaran intra-kurikuler, di mana konten diajarkan lebih efektif sehingga peserta didik mempunyai waktu yang cukup untuk memahami konsep dan mengembangkan keterampilan mereka. Guru mempunyai kemampuan untuk memilih berbagai metode pengajaran sehingga pelajaran dapat diselaraskan dengan gaya belajar dan kebutuhan masing-masing siswa. Dalam kurikulum ini terdapat proyek untuk menguatkan capaian profil pelajar dan bertujuan untuk mencapai target pembelajaran tertentu.

Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka menjadi dua konsep kunci yang diangkat oleh sistem pendidikan di Indonesia untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik.

Dalam konteks Merdeka Belajar, administrasi kurikulum memiliki peran penting dalam memastikan implementasi konsep Merdeka Belajar dan mencapai tujuan Kurikulum Merdeka. Administrasi kurikulum harus mampu mendukung fleksibilitas, kreativitas, dan kemandirian siswa. Administrasi kurikulum dari perspektif Merdeka Belajar menunjukkan bahwa inisiatif ini berkontribusi positif terhadap kemajuan pendidikan. Self-disiplin siswa, peningkatan fleksibilitas guru di kelas, dan peran guru adalah sebagai fasilitator yang menjadi komponen kunci dari gagasan bahwa Merdeka Belajar dapat menghasilkan efek yang berarti.

Meskipun demikian, masih ada beberapa hambatan yang mungkin muncul yang menghalangi kebutuhan untuk pelatihan guru dan evaluasi yang sedang berlangsung. Dengan pemantauan dan evaluasi proses implementasi serta upaya perbaikan yang fokus, administrasi kurikulum Merdeka Belajar dapat menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan lingkungan belajar yang lebih menarik dan relevan bagi siswa di era saat ini.

Proses Administrasi Kurikulum Perspektif Merdeka Belajar

1. Perencanaan

Pada dasarnya, pendidikan bukan hanya sekedar tuntutan ijazah saja, namun esensi dari pendidikan sebenarnya adalah bagaimana peserta didik dapat memaknai setiap proses pembelajaran agar nantinya bisa diselaraskan dengan kehidupannya (Ramadina, 2021). Maka dari itu, dibutuhkan adanya perencanaan yang matang agar tujuan pendidikan bisa terlaksana dengan efektif dan tepat. Perencanaan pendidikan yang dimaksud dapat diwujudkan melalui kurikulum.

Perencanaan sendiri merupakan kegiatan mempersiapkan hal-hal secara sistematis, tentang kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam kata lain perencanaan adalah suatu cara untuk mendapatkan sesuatu dengan sumber daya yang dikuasai agar tercipta efektivitas dan efisiensi (Jamrizal, 2022).

Dalam lingkup sekolah, langkah pertama dalam perencanaan kurikulum adalah dengan membentuk

tim pengembang kurikulum, yang nantinya bertugas untuk merancang kurikulum lembaganya. Adapun tim pengembang kurikulum di MI Masholihul Huda Krapyak terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau waka kurikulum, staf kurikulum, dan tim ahli atau anggota lain yang ditugaskan oleh kepala sekolah.

Setelah terbentuk tim pengembang kurikulum, selanjutnya dilakukan analisa kebutuhan. Dalam konteks kurikulum, John McNeil mendefinisikan analisa kebutuhan (*need assessment*) sebagai *“the process by which one defines educational needs and decides what their priorities are”*. Atau secara sederhana dapat dipahami sebagai prosedur yang dipakai dalam mendapatkan informasi mengenai kebutuhan peserta didik. Mengingat bahwa pendidikan haruslah menyediakan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik ketika nantinya ia berada di lingkungan masyarakat, maka analisa kebutuhan dalam hal ini merupakan suatu hal yang penting dan harus dilakukan dengan setepat mungkin.

Langkah selanjutnya ialah merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofi. Maksudnya adalah bahwa landasan filosofis harus menjadi tumpuan untuk mendapatkan jawaban tentang apa yang harus dilaksanakan sehingga pendidikan dapat menjadi jembatan penghubung keberhasilan peserta didik. Selain itu, landasan filosofis juga menjadi tumpuan bagi tim pengembang kurikulum dalam menganalisis,

mengambil keputusan atau berbagai pertimbangan, dan merumuskan hasil yang dikehendaki sesuai situasi yang ada.

Langkah selanjutnya adalah menentukan desain kurikulum. Desain kurikulum berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang siapa yang akan dikaitkan dalam pembuatan kurikulum, apa prosedur yang akan dipakai dalam pembuatan kurikulum (petunjuk administratif), dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Zais dalam Reksoatmodjo, mengatakan bahwa desain kurikulum berkaitan dengan pengaturan dan pengorganisasian komponen-komponen kurikulum (Reksoatmodjo) yang meliputi masalah utama dalam pengaturan materi pelajaran (*content*), yakni cakupan (*scope*), sekuens (*sequence*), kontinuitas (*continuity*) dan integrasi (*integration*).

Setelah hal-hal tersebut terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah membuat rencana induk, yang secara rinci meliputi tiga hal yaitu: pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Tahapan pengembangan mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menjelaskan rasional atau dasar pemikiran
- b. Perumusan visi, misi, dan tujuan
- c. Penentuan struktur dan isi program
- d. Pemilihan dan pengorganisasian materi
- e. Pengorganisasian kegiatan pembelajaran
- f. Pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar

- g. Penentuan cara mengukur hasil belajar.

Adapun tahap pelaksanaan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program pembelajaran (Modul ajar)
- b. Penjabaran materi guna menai aspek kedalaman pemahaman dan keluasan
- c. Penentuan strategi dan metode pembelajaran
- d. Penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran
- e. Penentuan metode dan alat penilaian proses dan hasil belajar
- f. Setting lingkungan pembelajaran

Tahap terakhir dalam membuat rencana induk adalah penilaian yang dilakukan untuk melihat sejauhmana kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, penilaian ini dapat berupa penilaian formatif maupun sumatif. Dalam proses perencanaan yang telah dijabarkan diatas, tentu dibutuhkan para ahli dalam bidang perencanaan kurikulum sehingga nantinya kurikulum dapat direncanakan dengan baik.

2. Pelaksanaan

Kurikulum yang telah dirancang, pada akhirnya di laksanakan di lembaga atau sekolah masing-masing. Kurikulum tersebut dapat dikatakan berhasil apabila peserta didik dapat menguasai materi yang telah disusun dalam kurikulum. Dalam pelaksanaannya, kurikulum direalisasikan dalam proses belajar mengajar, dimana perealisasiannya harus sesuai dengan tuntuan dari

kurikulum yang diharapkan (Helena turnip).

Berdasarkan hasil wawancara dengan waka kurikulum MI Masholihul Huda Krapyak, diketahui bahwa dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, secara garis besar tidak jauh berbeda dari kurikulum sebelumnya, yaitu mencakup beberapa pokok kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang berkaitan dengan tugas kepala sekolah
- b. Kegiatan yang berkaitan dengan tugas baru
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik
- d. Kegiatan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar
- e. Kegiatan ekstrakurikuler
- f. Kegiatan pelaksanaan evaluasi
- g. Kegiatan pelaksanaan pengaturan alat penunjang pembelajaran
- h. Kegiatan dalam bimbingan dan penyuluhan
- i. Kegiatan yang terkait dengan peningkatan mutu profesionalitas pendidik.

Dari sudut pandang administratif, implementasi kurikulum dapat dibagi menjadi dua tingkatan: di tingkat sekolah dan di kelas. Di tingkat sekolah, kepala sekolah memegang peranan utama dalam pelaksanaannya. Ketua mempunyai komitmen untuk melakukan berbagai kegiatan, yaitu membuat perencanaan tahunan, membuat rencana pelaksanaan latihan, memimpin pertemuan dan melakukan pengukuran serta mengumpulkan laporan. Sedangkan di tingkat kelas, gurulah yang berperan dalam

pelaksanaannya. Pembagian tugas guru harus terstruktur secara administratif untuk menjaga kelancaran pelaksanaan kurikulum di lingkungan kelas. Pembagian tugas tersebut meliputi 3 jenis kegiatan administrasi yaitu pembagian tugas mengajar, pembagian tugas pembinaan ekstrakurikuler dan pembagian tugas bimbingan belajar (Nasbi, 2017). Meskipun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan administrasi, namun antar keduanya memiliki keterkaitan dalam usaha mencapai keberhasilan pelaksanaan kurikulum.

3. Pengawasan

Kata lain pengawasan adalah *controlling* yang memiliki arti pemeriksaan. Dalam KBBI, pengawasan berarti pemilikan dan penjagaan. Maka pengawasan dapat dipahami sebagai usaha mempertahankan dan menjaga dengan baik. Dalam administrasi kurikulum perspektif merdeka belajar, apabila yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan rencana, maka dilakukan penyesuaian. Jadi, setiap administrator harus menegaskan bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.

Dalam administrasi, pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang diinginkan dan direncanakan. Pengawasan yang dimaksud disini meliputi pemeriksaan apakah segala sesuatunya berjalan sesuai rencana yang telah disusun, arahan yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan

(Natasya, 2019). Hal tersebut dilakukan agar dapat mengetahui kelemahan dan kesalahannya sehingga dapat diperbaiki dan dicegah agar tidak terulang kembali.

Pada umumnya, pengawasan meliputi kegiatan memeriksa apa yang sedang dilakukan, setuju atau tidakkah dengan hasil yang dicapai, kemudian menentukan apakah ada perbaikan atau tidak. Menurut Waka kurikulum MI Masholihul Huda Krapyak yang kami wawancarai, pengawasan perlu dilakukan sebab adanya perbedaan antara tujuan organisasi dengan tujuan pribadi, sehingga perlu dilakukan pengawasan untuk memastikan bahwa pelaksana kurikulum melaksanakan apa yang harusnya dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal.

Dalam kurikulum merdeka sendiri pengawasan yang dimaksud disini dilakukan oleh pengawas sekolah pada umumnya, guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan, dimana dalam kurikulum merdeka belajar, pengawas memiliki peran sebagai fasilitator, *coach*, mentor, dan trainer. Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilaksanakan bersama Waka kurikulum MI Masholihul Huda Krapyak, juga didapatkan perbedaan antara pengawas dalam paradigma lama dan baru. Dalam paradigma lama atau pada kurikulum sebelumnya, tugas pengawas lebih banyak melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan dalam bidang administrasi, seperti pemeriksaan RPP, daftar nilai, dan administrasi kepala sekolah.

Sedangkan, untuk paradigma baru atau dalam kurikulum merdeka belajar terjadi pergeseran fungsi, sehingga tugas pengawas bukan sekedar yang bersifat administratif, tapi lebih banyak pada upaya peninjauan profesionalisme pendidikan, sehingga perannya sudah mengembang pada peningkatan sistem pendidikan secara menyeluruh.

Selain itu, berdasarkan hasil dokumentasi dapat dipahami bahwa persepsi pengawas sekolah tentang kurikulum merdeka atau dalam perspektif merdeka belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut: (Mahmud, 2023).

- a. Pengalaman pengawas yang dianggap memiliki peran krusial dalam membentuk persepsi mereka terhadap persepsi merdeka belajar. Semakin seorang berpengalaman maka semakin luas pandangan mereka terhadap perubahan kurikulum guna meningkatkan kualitas pendidikan menjadi lebih baik.
- b. Latar belakang pendidikan pengawas sekolah, dimana pengawas yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi cenderung lebih memiliki pandangan yang lebih positif terhadap kurikulum dengan perspektif baru.
- c. Pelatihan yang diikuti pengawas, termasuk didalamnya kualitas dan jumlah pelatihan yang diikuti oleh pengawas, dianggap berkontribusi dalam membentuk kerangka persepsi pengawas terhadap kurikulum perspektif merdeka belajar.

- d. Pengalaman pribadi pengawas yang semakin beragam dan bervariasi, maka semakin mungkin mereka memiliki persepsi positif terhadap kurikulum persepektif merdeka belajar.
- e. Gelar pendidikan pengawas yang apabila semakin tinggi umumnya akan mendukung sikap positif terhadap perubahan dan revitalisasi kurikulum.

4. Evaluasi

Langkah terakhir dari proses administrasi kurikulum ialah evaluasi. Evaluasi adalah proses berkelanjutan dimana data yang dikumpulkan dan digunakan sebagai peninjauan yang bertujuan untuk memperbaiki sistem. Dalam pengembangan kurikulum, evaluasi seksama dinilai sangat esensial (Turnip et al., 2023).

Secara sederhana, evaluasi dapat dipahami sebagai suatu bagian dari sistem manajemen yang tujuan dilakukannya adalah untuk memahami bagaimana keadaan kurikulum tersebut dalam hal rancangan, pelaksanaan serta hasilnya (Nasbi, 2017). Dalam kurikulum merdeka belajar, evaluasi dilakukan dari dua perspektif yaitu evaluasi hasil belajar dan evaluasi program pengajaran. Evaluasi hasil belajar dilaksanakan untuk memberikan berbagai informasi secara berkelanjutan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah diperoleh. Sementara itu, penilaian atas tayangan program dilakukan dengan tujuan untuk mempertimbangkan hasil program serta berbagai variabel yang membantu atau menghambat kemajuan program (Arfiyansyah, 2019).

Evaluasi pada kurikulum dilakukan untuk menunjukkan bagaimana kurikulum tersebut diimplementasikan secara keseluruhan, dari berbagai sudut mulai dari kebee, efisiensi, relevansi, dan kelayakan program dievaluasi sebagai indikator kinerja. Disamping itu, evaluasi dimaksudkan sebab beberapa alasan yaitu, sebagai modifikasi program, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, dan penetapan tindak lanjut hasil pengembangan. Evaluasi sebagai modifikasi program maksudnya adalah bahwa informasi temuan dari evaluasi digunakan sebagai masukan untuk selanjutnya dilakukan modifikasi penting program kurikulum, yaitu peran evaluasi yang lebih konstruktif. Evaluasi juga digunakan sebagai pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, sebab evaluasi merupakan jenis laporan yang mengharuskan pengembang kurikulum untuk memberikan tanggapan kepada pihak-pihak terkait, mulai dari pemerintah, pendidik, orang tua, hingga masyarakat, serta pihak manapun yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan kurikulum. Selain itu, evaluasi juga dijadikan sebagai penetapan tindak lanjut dari hasil pengembangan. Maksudnya temuan tindak lanjut pengembang kurikulum dapat mengambil bentuk tanggapan terhadap dua pertanyaan yang berbeda, yaitu tentang apakah kurikulum baru akan diimplementasikan ke dalam sistem yang sekarang sedang berlaku ataukah tidak, dan bagaimana serta dalam keadaan yang seperti apa kurikulum baru akan dimasukkan ke dalam sistem yang saat ini sedang berlaku (Hamdi, 2020).

Di MI Masholihul Huda Krapyak sendiri, evaluasi kurikulum dalam perspektif merdeka belajar dilakukan oleh semua guru yang ada di madrasah tersebut. Hasil dari evaluasi tersebut, yang terdiri dari pengalaman dan tanggapan guru kemudian dilengkapi dengan data rapor pendidikan. Sedangkan, guru dalam pengelompokkan berdasarkan fase, guru kelas dalam satu fase, atau guru mata pelajaran dalam satu fase berdiskusi dan bekerjasama untuk melaksanakan perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil dari evaluasi tersebut. MI Masholihul Huda Krapyak sendiri memilih kebijakan mengenai evaluasi kurikulum yaitu dengan melakukan perkumpulan rutin guru, kebijakan penulisan rapor, dan pemberian feedback kepada peserta didik.

Kesimpulan

Berdasarkan gambaran di atas, maka cenderung diasumsikan bahwa pengorganisasian program pendidikan adalah keseluruhan rangkaian latihan yang disusun dan sungguh-sungguh diupayakan dalam keadaan belajar untuk mencapai tujuan-tujuan instruktif yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan merdeka belajar adalah kebebasan seseorang dalam memperjuangkan suatu perubahan pada dirinya dan dilakukan secara sengaja dan sadar dengan tetap mengikuti peraturan pemerintah. Administrasi kurikulum dalam perspektif merdeka belajar dapat dipahami sebagai suatu manajemen atau pengelolaan kurikulum yang berlandaskan pada prinsip merdeka belajar atau dalam arti lain dalam pemberlakuan kurikulum merdeka. Adapun proses administrasi kurikulum perspektif merdeka belajar

terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Proses perencanaan diawali dengan membuat tim pengembang kurikulum, dilanjutkan dengan analisa kebutuhan, merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofi, menetapkan desain kurikulum, dan membuat rencana induk. Adapun proses pelaksanaan pada dasarnya merupakan proses dimana kurikulum yang telah dikembangkan tersebut di implementasikan di lembaga pendidikan. Dalam pelaksanaannya tentu perlu dibarengi dengan proses pengawasan agar dapat di *monitoring* kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan awal. Setelah semua proses terlaksana, maka proses yang paling akhir ialah proses evaluasi, yang dilakukan guna mengetahui bagaimana kurikulum tersebut diimplementasikan.

Referensi

- Andriani, W. (2020). Pentingnya Perkembangan Pembaharuan Kurikulum dan Permasalahannya. *Universitas Lambung Mangkurat*, 1–12. <https://doi.org/10.35542/osf.io/rkjsj>
- Angga, Suryana, C., Nurwahidah, I., Hernawan, A. H., & Prihantini. (2022). Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7174–7187. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1230>
- Arfiyansyah, H. (2019). *Administrasi Peserta Didik*.
- Ariawan, S., Suncaka, E., & Wardani, T. (2023). *Administrasi Pendidikan*. Suler Pustaka.
- Azis, R. (2016). *pengantar Administrasi Pendidikan*. SIBUKU.

- Efendi, A., & Afriansyah, H. (2019). *Administrasi Kurikulum*. 53(9), 1689–1699.
file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf
- Efritania, M. (n.d.). *Pentingnya Administrasi Kurikulum dalam Pendidikan*. 3.
- Hamdi, M. M. (2020). Evaluasi Kurikulum Pendidikan. *Intizam, Jurnal Manajemen*, 4(1).
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode*. Hidayatul Quran Kuningan.
- Jamrizal. (2022). Pengaruh perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap kepemimpinan kepala sekolah (literature review manajemen pendidikan). *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 479–488.
- Khoirurrujal, Fadriati, Sofia, & Makrufi, A. D. (2022). *PENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA* (1st ed.). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Kurnia, E. P. (2019). *Administrasi Kurikulum*. *INA-Rxiv Papers*, 53(9), 1689–1699.
file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf
- Mahmud, W. (2023). Research Review. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2).
- Marliani, L. (2018). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh*, 5(4), 17–18.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1743/1407>
- Mastuti, R., Maulana, S., Iqbal, M., Faried, A. I., & Arpan. (2020). *Teaching From Home: dari Belajar Merdeka menuju Merdeka Belajar*. Yayasan Kita Menulis.
- Mustaghfiroh, S. (2020). Konsep “Merdeka Belajar” Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 3(1), 141–147.
<https://doi.org/10.30605/jsgp.3.1.2020.248>
- Nasbi, I. (2017). MANAJEMEN KURIKULUM: Sebuah Kajian Teoritis. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(2), 318–330.
<https://doi.org/10.24252/idaarah.v1i2.4274>
- Natasya, N. (2019). Pengertian Dan Proses Administrasi Kurikulum. *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Pendidikan*.
- Qori’ah, A. (2022). Konsep Belajar dalam Perspektif Pendidikan Islam. In *Universitas Islam Negeri Walisongo*.
<https://doi.org/10.15548/mrb.v2i1.327>
- Ramadina, E. (2021). Peran Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar. *Mozaic : Islam Nusantara*, 7(2), 131–142.
<https://doi.org/10.47776/mozaic.v7i2.252>
- Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A. (2020). Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 1(1), 141–157.
<https://doi.org/10.53802/fitrah.v1i1.13>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syafiie, I. K., & Welasari. (2017). *Ilmu Administrasi*. Pustaka Belajar.
- Turnip, H., Sihombing, S., Gaol, S., & Limbong, Y. T. (2023). *Administrasi Kurikulum. Pendidikan Sosial Dan*

Humaniora, 2(2), 133–138.
<https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/57/51>

Wahyuni, R., & Berliani, T. (2019).
Problematika Implementasi
Kurikulum 2013 Di Sekolah Dasar.
*Jurnal Manajemen Dan Supervisi
Pendidikan*, 3(2), 63–68.
<https://doi.org/10.17977/um025v3i22019p063>